



**KECAMATAN
BALONGBENDO
KABUPATEN
SIDOARJO**



**LKJIP
2022**





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN BALONGBENDO

Jl. Mayjen Bambang Yuwono No. 02 Kode Pos 61263 SIDOARJO

Telepon. (031) 8971003 Faks. (031) 8971003

E-mail : balongbendo@sidoarjokab.go.id

Website : www.balongbendo.sidoarjokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN BALONGBENDO TAHUN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 24 Februari 2023

CAMAT BALONGBENDO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

NIP. 197901141997111001

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001

FORMULIR CHECK LIST REVIEW

NO.	PERNYATAAN	CHECK LIST		DATA PENDUKUNG	
		YA	TIDAK		
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP			
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja			
		3. Lkj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai			
		4. Lkj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi			
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan (M)			
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan			
II	Mekanisme penyusunan	1. Lkj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu			
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang yang memadai			
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke unit penyusun LKj			
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja			
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya (M)			
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait			
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya (M)			
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja			
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis			
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja			
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasarn dalam Indikator Kinerja Utama			

		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat			
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran			
		9. Jika "tidak" telah mendapat penjelasan yang memadai			
		10. IKU dan IK telah SMART			

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi ekonomisnya.

Laporan Kinerja Kecamatan Balongbendo pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah (PD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, kedepannya laporan kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Balongbendo ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sidoarjo, 24 Februari 2023

CAMAT BALONGBENDO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

NIP. 197901141997111001

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina/ IVa

NIP. 19790114 199711 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balongbendo ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Balongbendo pada tahun 2022. Laporan ini memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada urusan kewilayahan, selain itu juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan sekaligus sebagai bentuk evaluasi diri terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Kecamatan Balongbendo senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan urusan kewilayahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Balongbendo yang memiliki tujuan utama yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum yang memiliki 2 sasaran yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang indikator dan target yang harus dicapai pada tahun 2022 ini yaitu pada indikator kinerja utama Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan target 100 %. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan indikator tujuan tambahan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target Sangat Baik (88,31), Nilai SAKIP dengan target A (80,01), Nilai RB dengan target 32,67, Nilai IPP dengan target A- (4,10) dan Persentase Serapan Anggaran dengan target 90 %.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Kecamatan Balongbendo dapat dikategorikan cukup berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari target indikator Program sebesar 100 % sesuai laporan E- Monev Kecamatan Balongbendo tahun 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

1 *Kedudukan*

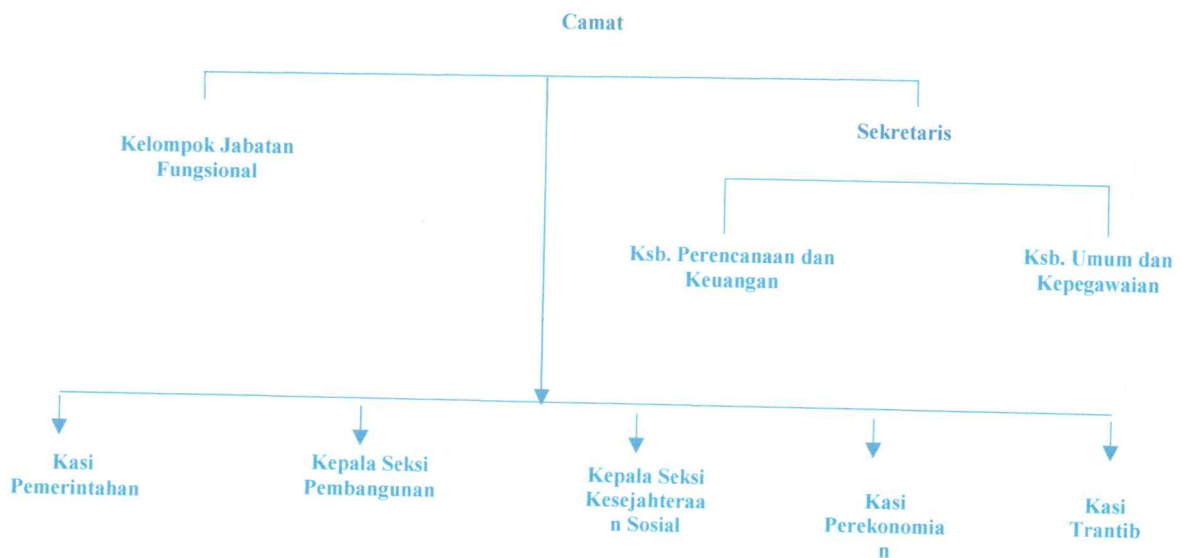
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kewilayahan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
5. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan.
10. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALONGBENDO



Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 23 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2022.

Tabel 1.1
DATA ASN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Administrator	2
2	Pengawas	2
3	Pelaksana	18
4	Jabatan Fungsional Ahli	0
5	Jabatan Fungsional Terampil	1

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Balongbendo per 31 Desember 2022 berjumlah 23 orang, dengan rincian 22 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk menunjang pelaksanaan kinerja Kecamatan Balongbendo, maka kami merekrut 13 orang pegawai Non ASN pada formasi tenaga administrasi umum, tenaga administrasi keuangan, banpol PP, tenaga kebersihan.

2 Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapaisaatinidengan yang direncanakan dan kesenjanganantaraapa yang ingindicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 1.2
PEMETAAN PERMASALAHAN POKOK, MASALAH DAN AKAR MASALAH**

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Kurangnya Pemahaman aparatur tentang pelayanan publik yang baik	Aparatur yang tidak didukung dengan adanya skill yang memadai	Kualitas Aparatur Pemerintah yang belum memadai.
2	Kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang belum memadai	Kurangnya diklat tentang pelayanan publik untuk aparatur	Sumber Daya Manusia Berlatar Belakang IT dan Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan yang masih minim
3	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis online perlu dibenahi		Penguasaan Teknologi Infomasi dan Komunikasi masih minim.
4	Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada Kerukunan Umat Beragama;	Kurangnya Pelatihan dan pendampingan terhadap aparatur terkait Kerukunan Umat Beragama	Peraturan perundangan pedoman dalam perencanaan dan pelaporan

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang rincian tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan tersedianya dukungan Anggaran dari APBD serta adanya sarana prasarana yang memadai maka optimis untuk dapat mengatasi masalah yang ada di Wilayah Kecamatan Balongbendo.
2. Optimasi sumber daya yang ada (tenaga/personil, dana dan sarana prasarana) serta adanya dukungan pelatihan secara teknis dari Dinas terkait maka dapat untuk mengatasi rendahnya kualitas SDMnya serta meningkatkan pengetahuannya.
3. Diharapkan dengan beban permasalahan di Wilayah Kecamatan Balongbendo ada tambahan anggaran agar dalam menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan dapat secara optimal.
4. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, maka diharapkan untuk diadakan Sarpras pendukungnya.
5. Dengan adanya kekeluargaan yang kuat antar karyawan, maka optimis untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Kecamatan Balongbendo.
6. Masih kurangnya kualitas pelayanan Kecamatan Balongbendo hal ini diketahui melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang masih memperoleh nilai 79,79 di tahun 2017.
7. Masih minimnya desa swasembada di Kecamatan Balongbendo. Saat ini Kecamatan Balongbendo memiliki 20 desa yang kesemuanya adalah desa swakarya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A *Visi dan Misi*

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha dan Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

B *Tujuan dan Sasaran*

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan RPJMD yang akan kami dukung adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha dan Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran RPJMD yaitu Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram yang dituju. Sehingga Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. **Tujuan** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 - b. **Sasaran 2** : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

C Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balongbendo. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(INDIKATOR KINERJA UTAMA)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %

Pada Indikator kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Renstra, pada indikator Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi target 100% dengan pertimbangan capaian tahun lalu 0 %, dan target di Renstra tahun 2022 100 %, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 100 %. Hal dikarenakan dalam rangka pelayanan yang prima kepada masyarakat, setiap permasalahan yang terjadi di desa yang masuk ke kecamatan melalui surat yang diregister oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat harus difasilitasi Camat selaku pimpinan kewilayahan di kecamatan.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (88,31)
		Nilai SAKIP	A (80,01)
		Nilai RB	32,67
		Nilai IPP	A- (4,10)
		Persentase Serapan Anggaran	90 %

Pada indikator kinerja tambahan merupakan penguatan pencapaian pada program strategis daerah, serta tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kepada Camat Balongbendo untuk dilaksanakan dan dicapai dan dilaporkan pada akhir tahun yang dikoordinasikan oleh

Bappeda, BPKAD, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi guna disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun.

D *Perencanaan Anggaran Tahun 2022*

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp.6.521.251.521,00 Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 6.283.789.304,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3.

LKjIP Kecamatan Balongbendo | 2022

Tabel 2.3
RINCIAN ANGGARAN PADA TAHUN 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.336.150,00	3.591.728.933,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.111.317,00	397.281.767,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.453.000,00	73.930.790,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.755.200,00	800.989.200,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.000.000,00	189.800.000,00
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	538.025.000,00	503.147.500,00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	38.912.500,00	26.025.000,00
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	936.909.190,00	646879950
3	Meningkatnya Kualitas	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.137.500,00	9.137.500,00

LKjIP Kecamatan Balongbendo 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.837.500,00	25.194.500,00
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.599.164,00	15.499.164,00
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.175.000,00	4.175.000,00
Total Anggaran					6.521.251.521,00	6.283.789.304,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
PENGELOMPOKAN NILAI DAN PREDIKAT KINERJA

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$> 90,01$	Sangat Baik
2	$80,01 \leq 90$	Baik
3	$70,01 \leq 80$	Cukup
4	$0 \leq 70,01$	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
PENGELOMPOKAN NILAI DAN PREDIKAT KINERJA

I. SASARAN UTAMA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %	Sangat Baik

II. SASARAN TAMBAHAN

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	101,59 %	Sangat Baik
			Nilai SAKIP		
			Nilai RB		
			Nilai IPP		
			Persentase Serapan Anggaran		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas bahwa Capaian Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 memiliki Realisasi Kinerja melampaui dari yang telah ditargetkan.

B ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022.

Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022:

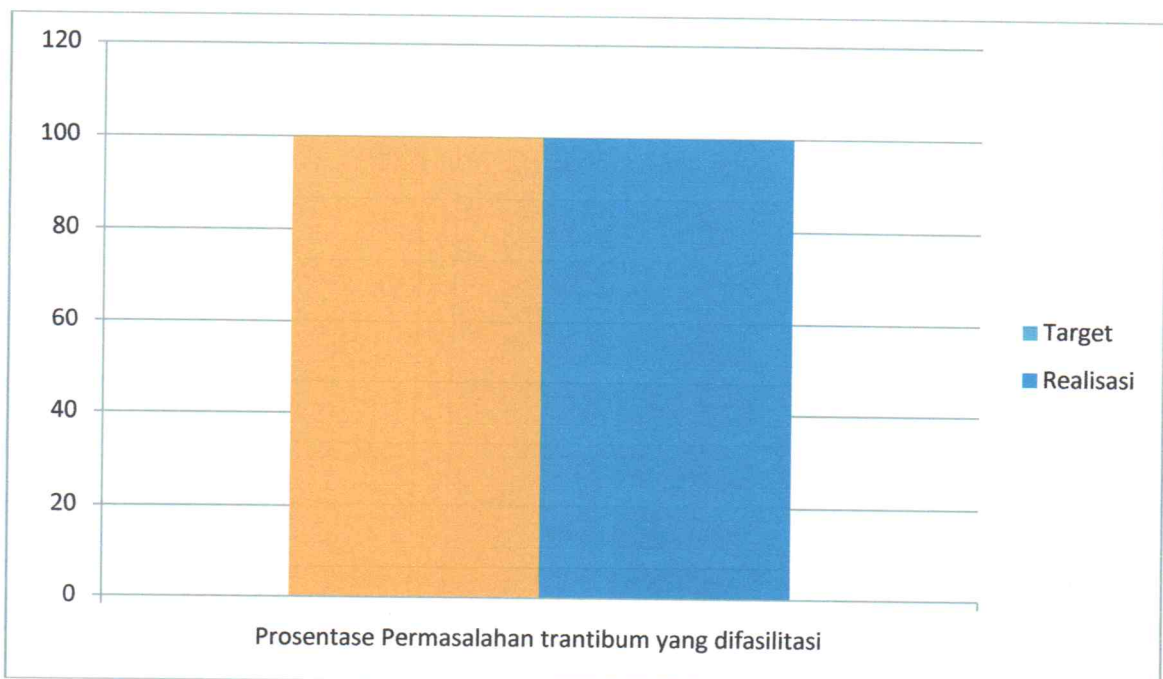
1. Sasaran Pertama Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2022 nilai capaian kerjanya sebesar 100 %. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kedua Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3.3
**REALISASI KINERJA SASARAN PERTAMA
 MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2022**




No.	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %

Grafik 3.1
**REALISASI KINERJA SASARAN PERTAMA
 MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2022**





Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Indikator Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi yaitu untuk mengukur Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi dapat direalisasi sebesar 100 % dari target 100 %.

Tabel 3.4
**PERMASALAHAN TRANTIBUM MENONJOL DI KEC. BALONGBENDO 2022
 YANG TELAH DITANGANI**

No	Permasalahan	Dokumentasi
1	<p>Sebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan liar di sepanjang Jl. Bakalanwringinpitu <p>Tindak lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Kepala Desa Bakalanwringinpitu tanggal 19 Januari 2022 - Koordinasi dengan pemilik bangunan liar yaitu Bpk. Rudy tanggal 25 Januari 2022 <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemilik bangunan liar bersedia untuk membongkar setelah dilakukan penjelasan bahwa bangunan yang didirikan berada di zona terlarang untuk dilakukan pendirian bangunan 	<p>Koordinasi Tanggal 19 Januari 2022</p>   <p>Koordinasi Tanggal 25 Januari 2022</p> 

		
<p>2</p>	<p>Sebab : Laporan warga Desa Seketi terkait pelaksanaan pembangunan Double Track di Desa Seketi</p> <p>Tindak lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan pelaksana dan desa terkait penghentian pembangunan dan pengalihan jalan Tanggal 3 Maret 2022 • Koordinasi dengan PJKA Tanggal 18 Maret 2022 <p>Hasil : Pengaspalan yang dilakukan Kecamatan Balongbendo Tanggal 29 Maret 2022</p>	<p>Koordinasi Tanggal 3 Maret 2022</p>   <p>Koordinasi bersama PJKA Tanggal 18 Maret 2022</p>  <p>Pengaspalan Jalan Tanggal 29 Maret 2022</p>

		
<p>3</p>	<p>Sebab : Terdapat kebakaran Rumah tinggal an. Sudarmi di Desa Balongbendo RT. 07/RW. 01 pada tanggal 26 Juni 2022</p> <p>Tindak Lanjut : Dilakukan koordinasi antara pihak Desa, Polsek Balongbendo dan BPBD Unit Krian guna Pemadam kebakaran (pembasahan) di olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilaksanakan Anggota Polsek Balongbendo.</p> <p>Hasil : Laporan melalui e-buddy kepada BPBD Kabupaten Sidoarjo agar korban mendapatkan bantuan material pada tanggal 27 Juni 2022</p>	
<p>4</p>	<p>Sebab : Surat Keputusan Bupati Sidoarjo terkait Lokasi Penjualan Ternak Kurban di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 nomor 188/370/438.1.1.3/2022 tanggal 23 Juni 2022 telah ditetapkan</p>	<p>Sidak Tanggal 5 Juni 2022</p>

	<p>Tindak Lanjut :</p> <p>Dilakukan penertiban penjualan ternak kurban karena dilakukan di luar lokasi yang telah ditetapkan bersama Penyuluh Pertanian karena ditemukan 2 pedagang di Jl. Sepanjang Kampung Pot Bunga Desa Kemangsen</p> <p>Hasil :</p> <p>Pedagang menerima aturan yang telah ditetapkan</p>	
<p>5</p>	<p>Sebab :</p> <p>Aduan masyarakat Desa Bakalanwringinpitu terkait limbah PT. Indonesia Cellular Concrete</p> <p>Tindak lanjut :</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinjau Lapang bersama DLHK dan Pemerintah Desa Bakalanwringinpitu Tanggal 15 Agustus 2022 • Rapat Koordinasi tanggal 24 Agustus 2022 di Balai Desa Bakalanwringinpitu 	<p>Kunjung Lapang Tanggal 15 Agustus 2022</p>  <p>Rapat Koordinasi Tanggal 15 Agustus 2022</p>

		
<p>6</p>	<p>Sebab : Pengaduan masyarakat terkait pengurusan lahan PT. Panca Graha Indonesia di Desa Kemangsen</p> <p>Tindak Lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warga yang datang ke Kantor Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2022 telah ditemui Camat Balongbendo dan dihadiri juga oleh Kapolsek Balongbendo dan Danramil Balongbendo yang diwakili Babinsa Kemangsen Suprpto . - Dilakukan Mediasi di Balai Desa Kemangsen tanggal 30 Desember 2022 sesuai surat Kepala Desa Kemangsen nomor 450/255/438.7.11.3/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dihadiri Camat Balongbendo, Kapolsek Balongbendo, Danramil Balongbendo, Pelaksana PT. Panca Graha Indonesia. <p>Hasil : Berita Acara Notulen Rapat</p>	 <p style="text-align: center;">Mediasi Tanggal 15 Desember 2022</p> <p style="text-align: center;">Mediasi Tanggal 30 Desember 2022</p>

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan kader trantibum.
2. Mengupayakan tindakan preventif seperti pembinaan, sosialisasi, mediasi dan komunikasi

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

1. Kurang meratanya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk dibeberapa orang saja
2. Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian ini tidak dapat kami bandingkan karena berbeda target. Untuk itu, kami akan membandingkan dengan instansi sejenis dalam hal ini Kecamatan Sukodono.

Tabel 3.5
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DI TINGKAT INSTANSI SEJENIS

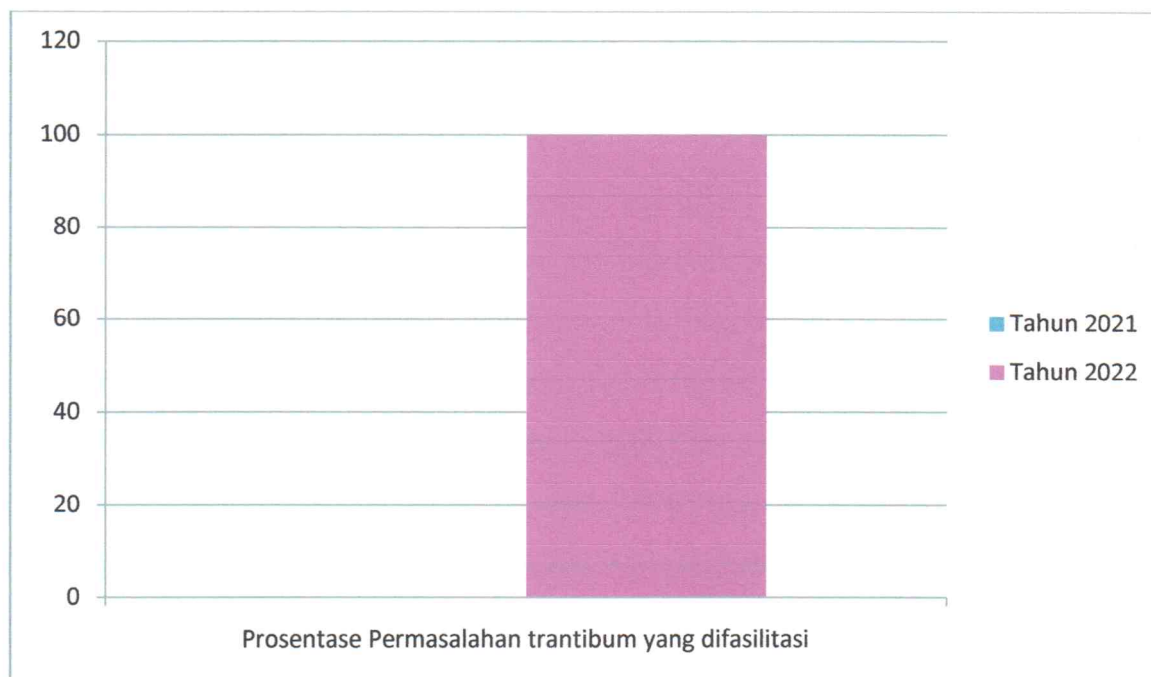
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Instansi Sejenis (Kecamatan Sukodono)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %	100 %

Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum juga mengalami kenaikan kinerja jika dibandingkan tahun 2021 Hal ini dikarenakan pada Tahun 2021, indikator Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi tidak ada dan merupakan indikator baru di tahun 2022.

Tabel 3.6
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN PERTAMA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	0 %	100 %

Grafik 3.2
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN PERTAMA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2021-2022



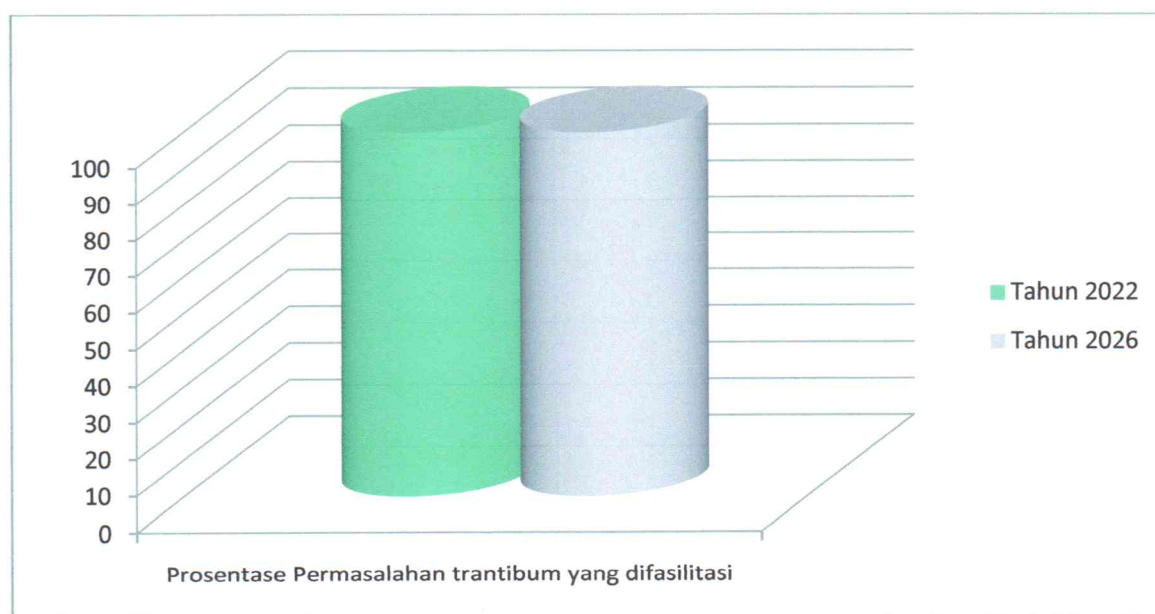
Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini tidak mengalami perkembangan terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026 dikarenakan permasalahan trantibum yang

terjadi harus dilakukan fasilitasi oleh kecamatan. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3.7
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN PERTAMA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP
TARGET AKHIR RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %

Grafik 3.3
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN PERTAMA
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP
TARGET AKHIR RENSTRA



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kedua Meningkatkan ketentraman dan

ketertiban umum adalah sebesar Rp. 34.332.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.426.600,00. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Tabel 3.8
REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100 %	100 %	34.332.000,00	33.426.600,00
A	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	9.137.500,00	8.423.300,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	9.137.500,00	8.423.300,00
		Jumlah operasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
		Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdaftar	6 Permasalahan	6 Permasalahan		
B	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	6 Permasalahan	6 Permasalahan	25.194.500,00	25.003.300,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25.194.500,00	25.003.300,00

2. Sasaran Kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Dalam sasaran kedua untuk tahun 2022 nilai capaian kinerjanya sebesar 101,59 %. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Tabel 3.9

REALISASI KINERJA SASARAN KEDUA

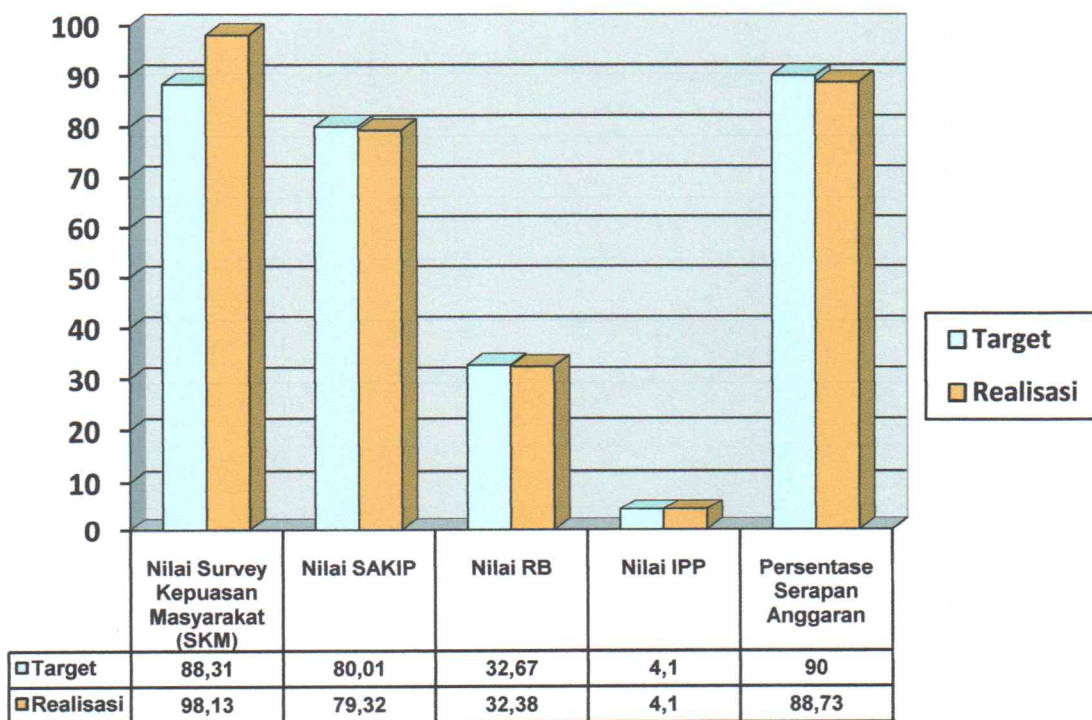
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (98,13)	111,12 %
		Nilai SAKIP	A (80,01)	BB (79,32)	99,14 %
		Nilai RB	32,67	32,38	99,11 %
		Nilai IPP	A- (4,10)	A- (4,10)	100 %
		Persentase Serapan Anggaran	90 %	88,73 %	98,59 %
Rata - Rata					101,59 %

Grafik 3.4

REALISASI KINERJA SASARAN KEDUA

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TAHUN 2022



Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator. Indikator pertama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu untuk mengukur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel 3.9 diatas, indikator pertama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Dapat direalisasi sebesar 98,13 (Sangat Baik) dari target 88,31 (Sangat Baik).

Indikator kedua Nilai SAKIP yaitu untuk mengukur tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel 3.9 diatas, indikator kedua Nilai SAKIP dapat direalisasi sebesar 79,32 (Kategori BB) dari target 80,01 (Kategori A).

Indikator ketiga Nilai RB yaitu untuk mengukur tingkat Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel 3.9 diatas, indikator ketiga Nilai RB dapat direalisasi sebesar 32,38 dari target 32,67.

Indikator keempat Nilai IPP yaitu untuk mengukur Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel 3.9 diatas, indikator keempat Nilai IPP dapat direalisasi sebesar 4,10 dari target 4,10.

Indikator kelima yaitu Persentase Serapan Anggaran yaitu untuk mengukur tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator kelima Persentase Serapan Anggaran dapat direalisasi sebesar 88,73% dari target 90 %

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2022 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pendampingan operator desa dengan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di bidang Pelayanan Publik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan setiap Tribulan.
2. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kasi Trantibum untuk meningkatkan kembali disiplin terhadap semua personil untuk melakukan penjagaan dan membagi kembali personil yg giat di desa dan pengamanan di dalam ruang pelayanan.
3. Melakukan jadwal piket bergilir untuk menjadi petugas informasi.
4. Penyelarasan/pengendalian sejak dini untuk menekan Ketidaksesuaian kegiatan APBDes dengan kegiatan RKPDes, dengan melakukan Evaluasi dan Verifikasi kesesuaian dokumen masing-masing desa.
5. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah/desa dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait Aset Desa mengundang Inspektorat, Bagian Hukum dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran kedua adalah sebagai berikut:

1. Kurang meratanya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk di beberapa orang saja
2. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara daring juga membutuhkan sistem informasi yang responsif, baik dalam perihal kecepatan akses maupun kapasitas penyimpanan yang lebih besar.
3. Terkait anggaran terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan penyerapan secara maksimal dikarenakan terkendala faktor eksternal contohnya SSH yang terlalu tinggi dan kegiatan narasumber dewan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional maka capaian ini tidak dapat kami bandingkan karena berbeda target. Untuk itu, kami akan membandingkan dengan instansi sejenis dalam hal ini Kecamatan Sukodono.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Kecamatan maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih diperlukan upaya untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat kecamatan (instansi sejenis).

Tabel 3.10

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DI TINGKAT INSTANSI SEJENIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja Instansi Sejenis (Kecamatan Sukodono)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (98,13)	Sangat Baik
		Nilai SAKIP	BB (79,32)	A (80,49)
		Nilai RB	32,38	33,29
		Nilai IPP	A- (4,10)	A-
		Persentase Serapan Anggaran	88,73 %	94,13 %

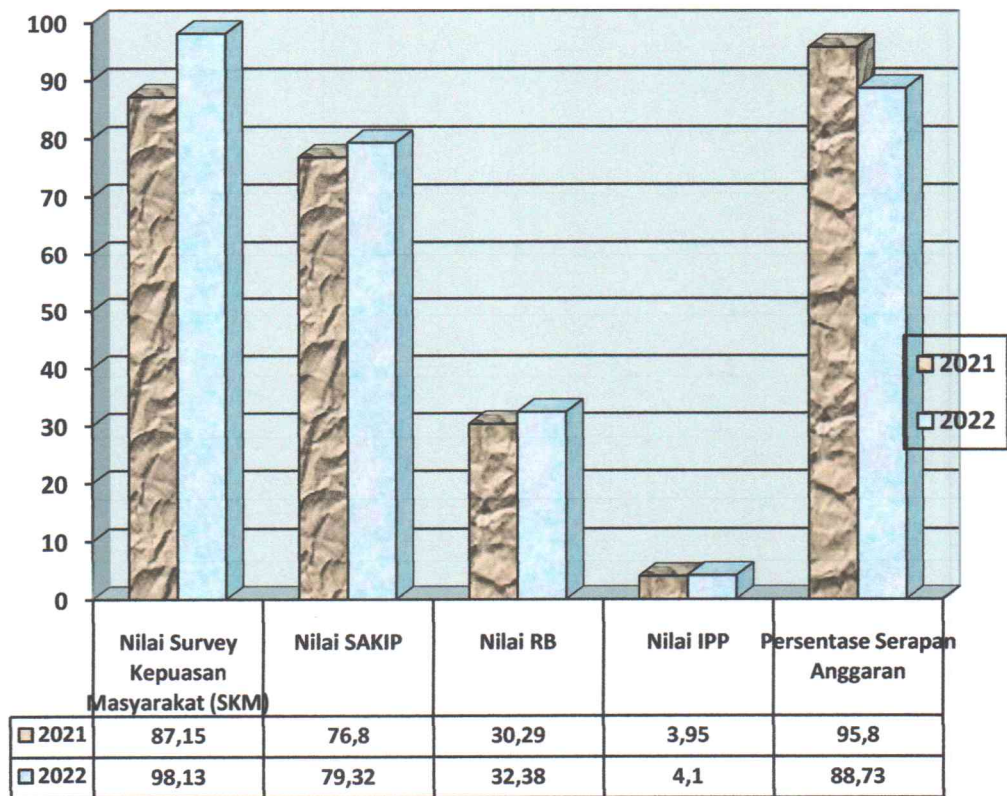
Realisasi kinerja tahun 2022 pada sasaran kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh :

1. Penggunaan aplikasi Sipraja dan Plavon Dukcapil
2. Pengiriman berkas yang sudah selesai melalui Pos
3. Komplain di SKM Online yang langsung ditindaklanjuti
4. Evaluasi APBDes dengan Tim Kecamatan dan desa melakukan paparan tentang kegiatan yang diusulkan
5. Verivikasi Usulan Musrenbang sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sehingga meminimalisir usulan yang ditolak akibat salah OPD tujuan atau kesalahan lainnya.
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sipraja Gemilang 2.0 bagi Operator Sipraja, Plavon dan E Buddy tanggal 18 Januari 2022
7. Monitoring masing-masing seksi setiap Tribulan selama Tahun 2022

Tabel 3.11
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN KEDUA
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
TAHUN 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Baik (87,15)	Sangat Baik (98,13)
		Nilai SAKIP	BB (76,80)	BB (79,32)
		Nilai RB	30,29	32,38
		Nilai IPP	B (3,95)	A- (4,10)
		Persentase Serapan Anggaran	95,80	87,83 %

Grafik 3.5
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN KEDUA
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
TAHUN 2021-2022

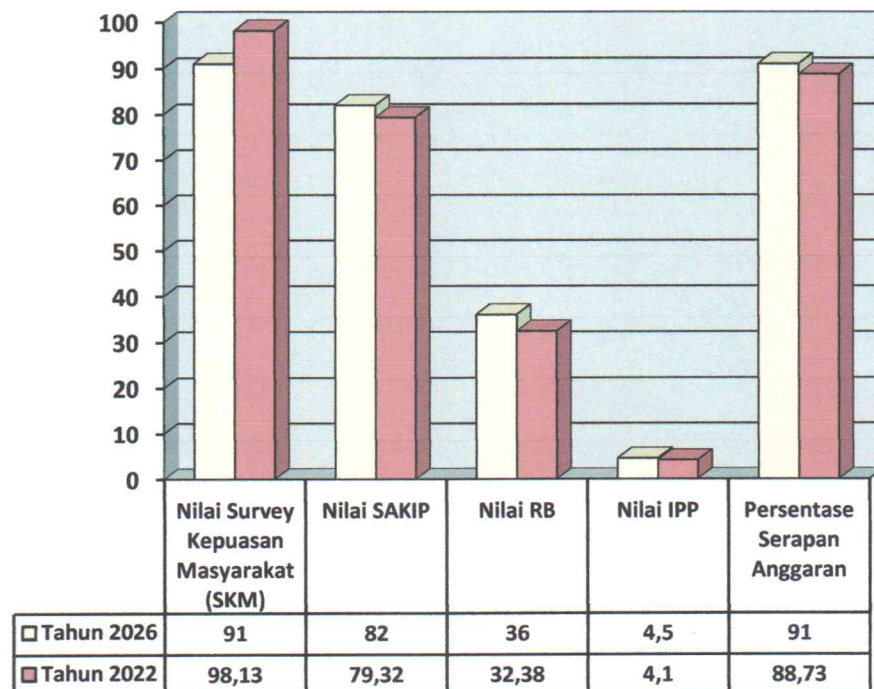


Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah/tidak mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 3.12
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN KEDUA
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra (2026)	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (91.00)	Sangat Baik (98,13)	107,84 %
		Nilai SAKIP	A (82.00)	BB (79,32)	96,73 %
		Nilai RB	36	32,38	89,94 %
		Nilai IPP	A- (4.50)	A- (4,10)	91,11 %
		Persentase Serapan Anggaran	91 %	88,73 %	97,50 %

Grafik 3.6
PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN KEDUA
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA



Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan

yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan adalah sebesar Rp. 6.249.457.304,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.541.972.039,00. Output dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat mengungkit realisasi sasaran kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kedua Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Tabel 3.13
REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90,50	100,00	5.053.730.690,00	4.7913.921.273,00
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	84 %	88,73 %	3.591.728.933,00	3.426.710.685,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	26 Orang	26 Orang	3.591.728.933,00	3.426.710.685,00
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,50	98,13	397.281.767,00	355.834.911,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	107 Buah	107 Buah	4.832.080,00	4.255.140,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	835 Buah	835 Buah	22.299.042,00	16.989.020,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	14 Buah	14 Buah	12.669.140,00	11.373.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	3500 Liter	3500 Liter	118.700.000,00	103.673.701,00
		Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	6500 Liter	6500 Liter		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	14.700.000,00	11.332.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah buku	2 Jenis	2 Jenis	4.356.000,00	4.260.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia (jenis)				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia (jenis)	21 Jenis	21 Jenis	21.601.196,00	12.595.550,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	1978 Kotak	1978 Kotak	52.016.480,00	50.005.000,00
		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	750 Kali	750 Kali	146.107.829,00	141.351.200,00
		Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		
C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	0 Jenis	0 Jenis	73.930.790,00	67.223.500,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	4 Unit	4 Unit	73.930.790,00	67.223.500,00
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	100 %	800.989.200,00	763.188.380,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	148.840.000,00	133.198.279,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	9 Orang	9 Orang	652.149.200,00	629.990.101,00
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	0 Orang	0 Orang		
		Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
		yang terbayar				
		Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	12 Orang	12 Orang		
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	37 Unit	37 Unit	189.800.000,00	178.963.797,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	0 Jenis	0 jenis	27.500.000,00	24.006.050,00
		Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit		
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	2 Unit	2 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	0 Jenis	0 jenis	23.500.000,00	17.809.900,00
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit	4 Unit		
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	4 Unit	4 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	25.000.000,00	24.630.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/ru mah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	90 M2	90 M2	113.800.000,00	112.517.847,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100 %	100 %	1.176.052.450,00	733.905.766,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
		Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	100 %	0 %		
		Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %		
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	25 Laporan	25 Laporan	503.147.500,00	151.711.775,00
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	503.147.500,00	151.711.775,00
		Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
		Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	20 Kegiatan	20 Kegiatan		
		Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		
B	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	4900 Berkas	4900 Berkas	26.025.000,00	21.838.191,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang diterima	5000 Berkas	5000 Berkas	26.025.000,00	21.838.191,00
		Jumlah Peserta sosialisasi	80 Orang	80 Orang		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
		Pelayanan Umum				
C	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	0 Berkas	0 Berkas	646.879.950,00	560.355.800,00
		Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup pemerintahan dan perekonomian yang disusun	16 Laporan	16 Laporan		
		Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	14 Laporan	14 Laporan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang terdaftar	0 Berkas	0 Berkas	0,00	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5.675.000,00	4.867.900,00
		Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
		Jumlah monev bidang pemerintahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
		Jumlah monev bidang perekonomian	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan	0 Kegiatan	0 kegiatan	641.204.950,00	555.487.900,00
		Jumlah Kegiatan pembinaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
		tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang telah dilaksanakan				
		Jumlah kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan	10 Kegiatan	10 Kegiatan		
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	15.499.164,00	11.980.000,00
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.499.164,00	11.980.000,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	0 Kegiatan	0 Kegiatan	15.499.164,00	11.980.000,00
		Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	4.175.000,00	4.165.000,00
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai	20 Desa	20 Desa	4.175.000,00	4.165.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
		dengan ketentuan dan tepat waktu				
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.175.000,00	4.165.000,00
Total					6.249.457.304,00	5.541.972.039,00

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran kedua Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Dari hasil evaluasi pelayanan publik diperoleh informasi bahwa belum semua masyarakat mengetahui tentang beberapa perubahan/perkembangan dalam pengurusan dokumen kependudukan, sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi kepada perangkat desa agar menyampaikan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan evaluasi khususnya pelayanan publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini. Digitalisasi layanan tersebut berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP sehingga lebih mengurangi interaksi tatap muka dengan masyarakat

C Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.14
REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100 %	100 %	100	34.332.000,00	33.426.600,00	97,36
A	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100 %	100 %	100	34.332.000,00	33.426.600,00	97,36
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	100	9.137.500,00	8.423.300,00	92,18
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	6 Permasalahan	6 Permasalahan	100	25.194.500,00	25.003.300,00	99,24
2	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (88,31)	Sangat Baik (98,13)	111,12	6.249.457.304,00	5.541.972.039,00	88,68
		Nilai SAKIP	A (80,01)	BB (79,32)	99,14			

LKjIP Kecamatan Balongbendo | 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	kecamatan	Nilai RB	32,67	32,38	99,11			
		Nilai IPP	A- (4,10)	A- (4,10)	100			
		Persentase Serapan Anggaran	90 %	88,73 %	98,59			
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90,50	100,00	110,50	5.053.730.690,00	4.791.921.273,00	94,82
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	84 %	88,73 %	105,63	3.591.728.933,00	3.426.710.685,00	95,41
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,50	98,13	114,77	397.281.767,00	355.834.911,00	89,57
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	0 Jenis	0 Jenis	100	73.930.790,00	67.223.500,00	90,93
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	100 %	100	800.989.200,00	763.188.380,00	95,28
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	37 Unit	37 Unit	100	189.800.000,00	178.963.797,00	94,29

LKjIP Kecamatan Balongbendo | 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100 %	100 %	100	1.176.052.450,00	733.905.766,00	62,40
		Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang Diterbitkan	100 %	0 %	0			
		Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100			
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	25 Laporan	25 Laporan	100	503.147.500,00	151.711.775,00	30,15
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	4900 Berkas	4900 Berkas	100	26.025.000,00	21.838.191,00	83,91
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2	0 Berkas	0 Berkas	100	646.879.950,00	560.355.800,00	86,63

LKjIP Kecamatan Balongbendo | 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Dilimpahkan kepada Camat	yang diterbitkan						
		Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan hidup pemerintahan dan perekonomian yang disusun	16 Laporan	16 Laporan	100			
		Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	14 Laporan	14 Laporan	100			
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	100	15.499.164,00	11.980.000,00	77,29
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	15.499.164,00	11.980.000,00	77,29
D	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	100	4.175.000,00	4.165.000,00	99,76
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan	20 Desa	20 Desa	100	4.175.000,00	4.165.000,00	99,76

LKjIP Kecamatan Balongbendo | 2022

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu						

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisien
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100	97,40	2,64
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	101,59	88,68	12,92
	Nilai SAKIP			
	Nilai RB			
	Nilai IPP			
	Persentase Serapan Anggaran			

1. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

➤ SASARAN MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi. Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan penyerapan anggaran sebesar 97,40 % sehingga diperoleh efisiensi sebesar 2,64 %. Efisiensi dimaksud disebabkan antara lain adalah efisiensi pengadaan banner sesuai dengan harga pasar dan jumlah peserta pembinaan linmas yang dikirim oleh desa sehingga anggaran yang bersifat penyediaan tidak terserap maksimal.

➤ SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Indikator sasaran Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP dan Persentase Serapan Anggaran. Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, untuk rata - rata nilai 5 (lima) indikator dapat disampaikan bahwa indikator kinerja telah tercapai 101,59 %, dan penyerapan anggaran sebesar 88,70 % sehingga diperoleh efisiensi sebesar 12,92%. Efisiensi tersebut disebabkan :

- Kegiatan Narasumber DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan sesuai dengan batas kewajaran.

- Efisiensi karena pengadaan melalui e-Purchasing dan pembelian langsung ke toko menyebabkan silpa anggaran. Sehingga silpa anggaran berupa serapan anggaran sebesar 88,70 % dikarenakan silpa anggaran bukan karena kegiatan yang tidak terlaksana.

BAB IV PENUTUP

A *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu 2 (Dua) Sasaran dengan kategori sangat berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh stakeholder

Secara keseluruhan, beberapa indikator masih belum tercapai diantaranya Nilai SAKIP yang tercapai nilai BB (79,32) dari target A (80,01), Nilai Reformasi Birokrasi yang tercapai dengan nilai 32,38 dari nilai 32,67 yang ditargetkan, dan Prosentase Penyerapan Anggaran 88,73 % dari nilai 90 % yang ditargetkan. Hanya indikator Nilai SKM Kecamatan, Nilai IPP dan Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi yang berhasil. Artinya dari 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator masih tercapai 50 %. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti pencetusan koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan instansi vertikal di wilayah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran dan instansi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada outcome, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Untuk sasaran yang dikategorikan sangat berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

- Kurang meratanya kompetensi SDM aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga beban kerja menumpuk di beberapa orang saja

- Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara daring juga membutuhkan sistem informasi yang responsif, baik dalam perihal kecepatan akses maupun kapasitas penyimpanan yang lebih besar
- Terkait anggaran terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan penyerapan secara maksimal dikarenakan terkendala faktor eksternal
- Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat

B Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Melakukan reuiu terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada Tahun 2022 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023 sekaligus dengan perubahan Renstra 2021 - 2026.
2. Mendorong pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran, termasuk rencana aksi yang telah ditetapkan masing - masing seksi dan sub bagian.
3. Mendorong koordinasi yang intensif dengan pelaksanaan Rapat Dinas setiap bulan dengan jajaran Forkopimka dan instansi terkait guna menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Balongbendo.
4. Terus melakukan monitoring dan evaluasi atas program yang berjalan, agar program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan.
5. Melakukan identifikasi secara berkala potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Balongbendo.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022
https://drive.google.com/file/d/1sr9k9VfSXMm3rCOdFpbpij69Ji_V1izW/view?usp=share_link
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022
https://drive.google.com/file/d/1ByFI0Am2HeLz15SA5_9W44x5Dodk_iBs/view?usp=sharing
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural dan Staf di Kecamatan Balongbendo Tahun 2022
<https://drive.google.com/file/d/1jipUM51eIQCRdWDzFxp1rV7rBKwA--q9/view?usp=sharing>

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

https://drive.google.com/file/d/1c9xtQnW8nQf_5jEpmcAjCPg6LRQJ7A_I/view?usp=sharing

C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022

<https://drive.google.com/file/d/1VdfI0vm-HTTe6VhGW-4ymGUQWT-AHozc/view?usp=sharing>

D. Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2022

<https://drive.google.com/file/d/1uHDp9AqInLdaHIXQ-RspRyhfhYVNd4Ud/view?usp=sharing>

E. Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2022

<https://drive.google.com/file/d/1irmc3OamGUJiF00MeP2cnDicB78HU8PA/view?usp=sharing>